



KR-M Thoha

Karya berbentuk gajah yang bagian luarnya dari lembaran tikar yang terbuat dari daun pandan tampil pada Kirab Budaya G20.

SOAL KEBOCORAN DATA NEGARA

Mahfud: Itu Hal-hal yang Sudah Diberitakan

JAKARTA (KR) - Kasus kebocoran data negara yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir ini, tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara Republik Indonesia. Menkopolkum Mahfud MD mengatakan, soal bocornya data negara, memang terjadi.

"Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolkum), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolkum Jakarta, Senin (12/9).

Dengan demikian, menurut Mahfud, kasus tersebut belum membahayakan data negara. Karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di

media. "Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran (media) tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca," tegasnya.

Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan, pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut. Sebelumnya, peretas yang mengaku sebagai 'Bjorka' melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden RI

Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim 'Bjorka' itu disebarluaskan sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9). Unggahan tersebut mengklaim, surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk sebuah surat yang dikirimkan BIN berlabel rahasia telah bocor.

Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono menegaskan, tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor di jagat maya. "Nanti, pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta. (Ant)-d

CEGAH KEBOCORAN DATA

KPU Perkuat Keamanan Siber

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum (pemilu). Semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu terus diupgrade teknologinya, termasuk keamanannya.

Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (12/9) mengatakan, KPU mengapresiasi soal perhatian keamanan data yang disampaikan Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat. Hal itu, merupakan wujud perhatian tinggi terhadap keamanan data, khususnya berkaitan dengan pemilu.

"Tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sudah antisipasi, karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif," jelasnya.

Sebelumnya, KPU memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik institusi tersebut aman dari kebocoran data siber. "Ini kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak? Ya kami

pastikan aman," kata Idham.

KPU juga telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber Aplikasi KPU terkait keamanan siber dan data elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Selanjutnya, soal data pemilu, Idham mengatakan, data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran dan telah tersebar di berbagai daerah. Untuk memastikan keamanan data tersebut, KPU telah meminta jajarannya di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan dalam berbagai proses tahapan pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengingatkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati terhadap persoalan keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data-data terkait pemilu ke depannya. Hal itu diungkapkan Syamsurizal menanggapi kasus kebocoran data nasional yang ramai diperbincangkan publik beberapa hari terakhir oleh peretas yang mengaku sebagai 'Bjorka'.

Syamsurizal mengungkapkan kekhawatirannya atas keberadaan kelompok peretas yang dapat merusak jalannya proses penyelenggaraan pe-

milu, sebagaimana isu peretasan data surat-menyurat milik Presiden RI Joko Widodo yang memenuhi berbagai media beberapa hari belakangan ini.

Selain itu, Syamsurizal mengatakan, peretas Bjorka juga menyebut telah membongkar data Menteri BUMN Erick Thohir serta Menkominfo Johnny G Plate. Isu peretasan serupa, ujarnya lagi, sempat mencuat pula pada Pemilu 2014 lalu, di mana muncul isu adanya 250 peretas asal Tiongkok yang mencemari Pemilu 2014.

Oleh karenanya, ia mengingatkan agar isu-isu peretasan data tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyusun aturan-aturan terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk mengambil langkah antisipatif terkait pengamanan kebocoran data pemilu oleh peretas.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait keberadaan peretas yang mengganggu proses pemilu. Menurutnya, kasus peretas yang melakukan jual beli data mengancam proses kerja keras yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen.

(Sim/Ant)-d

KASUS KORUPSI MANDALA KRIDA

KPK Panggil 8 Saksi Lagi untuk Diperiksa

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 pada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta terus memeriksa para saksi. Pada Senin (12/9), penyidik KPK memanggil delapan saksi dalam kasus tersebut.

"Pada hari Senin penyidik melakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka EW (Edy Wahyudi). Pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY," tutur Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/9).

Dijelaskan Ali Fikri, tersangka EW merupakan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK). Sedangkan para saksi yang dipanggil yakni Mochamad Amin Agustyongg selaku wiraswasta (pedagang/network

marketing) dan Nugroho Wuri Sayekti selaku wiraswasta.

Selain itu, Yatmin selaku wiraswasta/Komisaris PT Bayanaka Cipta Arta, Thomas Hartono sebagai koordinator proyek PT Duta Mas Indah. Berikutnya, persiapan pegawai negeri sipil (PNS) Raden Purnama, PNS pada Balai Pemuda dan Olahraga DIY Sundari, pimpinan proyek pembangunan Stadion Mandala Krida 2014-2015 Toto Birowo, dan Hendi Hidayat selaku Direktur CV Alam Raya Utama Sejahtera.

Terhadap kasus ini, menurut Ali, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Heri Sukamto (HS) selaku Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) dan Direktur PT Duta Mas Indah (DMI) dan Sugiharto (SGH) selaku Direktur Utama (Ditru) PT Arsigraphi (AG).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY di

tahun 2012 mengusulkan proyek renovasi Stadion Mandala Krida. Usulan tersebut disetujui dan anggarannya dimasukkan dalam alokasi anggaran BPO untuk program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kemudian, EW diduga secara sepihak menunjuk langsung PT AG dengan SGH selaku Dirut untuk menyusun tahapan perencanaan pengadaan, yang salah satunya terkait nilai anggaran proyek renovasi Stadion Mandala Krida. Dari hasil penyusunan anggaran di tahap perencanaan yang disusun SGH tersebut, KPK mengungkapkan dibutuhkan anggaran senilai Rp 135 miliar untuk lima tahun.

KPK menduga ada beberapa nilai jenis pekerjaan yang nilainya di-"mark up" dan langsung disetujui EW tanpa melakukan kajian terlebih dulu. Khusus di tahun 2016, disiapkan anggaran senilai Rp 41,8 miliar dan di tahun 2017 disiapkan anggaran senilai Rp 45,4 miliar. (Ful)-d

KIRAB BUDAYA DI BOROBUDUR

'Nyawiji Nunggal Rasa' Usung Kebersamaan

MAGELANG (KR) - Kirab budaya dan rapat raksasa mewarnai rangkaian kegiatan G20 Bidang Kebudayaan di wilayah Borobudur Magelang, Senin (12/9). Kegiatan ini dilaksanakan dari Candi Pawon menuju area Taman Lumbini Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB). Puluh-an penjor hiasan yang terbuat dari daun kelapa muda menghiasi sisi kanan dan kiri jalan yang dilewati peserta kirab.

Kirab Budaya ini diikuti 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Setiap desa mengerahkan 100 orang. Selain itu, ditampilkan pula karya-karya menarik lainnya, baik berupa ular naga, gajah, ikan, burung dan lain-lain.

Desa Karangrejo Borobudur menampilkan karya berbentuk Ular Naga Jawa. Kepala Desa Karangrejo M Hely Rofikun mengatakan, menurut filosofinya, naga itu sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Intinya warga Desa Karangrejo, sangat antusias. Mereka setiap malam bahu-membahu mensukseskan acara ini.

Dari Desa Kembanglimus Borobudur menampilkan ikon karya berbentuk seekor gajah. Pendamping Desa Kembanglimus

Cipto mengatakan, gajah sendiri ada relief Jataka di bangunan Candi Borobudur. Gajah secara simbolis juga merupakan simbol ilmu pengetahuan, lambang keilmuan, kuat dan kokoh serta kekar.

Diperoleh informasi, kisah Jataka yang terpatut dalam relief Candi Borobudur diambil sebagai tema kirab budaya yang menginspirasi warga tiap-tiap desa dalam penciptaan karya instalasi ragam fauna, yang nantinya diusung dalam gerak bersama barisan kirab.

Begitulah cara warga melestarikan dan merayakan candi Borobudur, sehingga filosofi positif dan nilai spiritual yang dimiliki ikon fauna tersebut menjadi bagian dari kehidupan warga untuk kembali bangkit dan pulih. Selain itu, warga juga mempersiapkan berbagai makanan tradisional dan produk kuliner lokal andalan desa masing-masing untuk ikut diusung saat kirab.

Kirab bertajuk *Nyawiji Nunggal Rasa* ini mengusung semangat kebersamaan masyarakat bahu membahu untuk bisa kembali bekerja dan berkarya selaras dengan alam sesuai tema besar G20 Indonesia 2022, *Recover Together, Recover Stronger*. (Tha)-d

Penyelesaian Tenaga Non-ASN Diupayakan Tanpa Ganjalan

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di hadapan ketua dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Menteri Azwar Anas menjelaskan bahwa Kementerian PANRB terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait agar proses penyelesaian tenaga non-ASN minim ganjalan.

"Kita tidak berhenti untuk menyamakan persepsi dan memutakhirkan data karena masalah penataan tenaga non-ASN ini bukan hanya teknis tapi juga komunikasi," ujarnya saat menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Jakarta, Senin (12/9).

Anas juga menyoroti tentang fleksibilitas kebijakan terkait penataan tenaga non-ASN. Mantan Bupati Banyuwangi ini menganalogikan bahwa aturan yang dibuat ketat seperti pagar yang tinggi hanya akan membuat pelaksana kebijakan mencari

celah agar bisa melompanya.

"Agar aturan ini bisa menjadi jalan tengah dan solusi, pihak-pihak terkait ini harus duduk bersama agar punya perspektif yang sama dan berjalan selaras untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni juga menjabarkan alternatif kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintah selain melalui proses rekrutmen CASN. Menurutnya, tenaga kerja yang diperlukan dapat diperoleh dengan memanfaatkan program-program pemerintah yang ada secara kolaboratif.

"Kita bisa kolaborasi berbagai program lintas stakeholder untuk memenuhi kebutuhan pemerintah," ujarnya.

Menutup rapat kerja, Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat menyampaikan kesimpulan rapat yang juga menjadi rekomendasi dari Komite I DPD RI kepada Kementerian PANRB. (Ati)-d

SUAP PERIZINAN DI KOTA YOGYA

GM Sebuah Hotel Turut Jadi Saksi

JAKARTA (KR) - Penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat saksi. Para saksi yang dipanggil, menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, diperiksa untuk tersangka mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan.

"Hari ini (Senin kemarin), KPK melakukan pemeriksaan saksi atas tindak pidana korupsi dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta untuk tersangka HS dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," jelas Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/9).

Mengenai empat saksi tersebut adalah General Manager (GM) Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo. Sedangkan, dua saksi lain dari pihak swasta masing-masing Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro dan Daniel Feriyanto.

Diungkapkan Fikri, dalam perkara ini KPK telah menetapkan HS bersama dua orang lainnya sebagai tersangka atas dugaan menerima suap yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta

Nurwidhiartana (NWH) dan Triyanto Budi Yuwono (TBY), sekretaris pribadi merangkap ajudan HS.

Sementara, untuk tersangka yang diduga sebagai pemberi suap ialah Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk. Saat ini uang bumpersangkutan sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta.

KPK sebelumnya memaparkan konstruksi perkara, pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta.

Pemohonan izin berlanjut di 2021, di mana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022. Dalam hal ini KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS. (Ful)-d



KR-Antara/Mohammad Ayudha

PENYALURAN BLT BBM: Petugas PT Pos Indonesia mencocokkan data warga penerima manfaat saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Senin (12/9). Sebanyak 63.000 data penerima BLT dari Kota Solo mendapat BLT BBM sebesar Rp 500.000 yang akan disalurkan selama 10 hari ke depan.